ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA *FRAUD* DI SEKTOR PEMERINTAHAN (Studi Kasus pada OPD Kabupaten Seruyan)

Titis Widhiani

Dosen Pembimbing: Dr. Dra. Lilik Purwanti, M.Si., Ak.

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono 165, Malang 65145, Indonesia
E-mail: titiswidhiani@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh sistem pengendalian internal, peluang, moralitas individu, penegakan hukum dan gaya kepemimpinan terhadap *fraud* di sektor pemerintahan. Penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dianalisis dengan regresi linear berganda aplikasi SPSS. Responden dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada OPD Kabupaten Seruyan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peluang dan moralitas individu berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan, sedangkan sistem pengendalian internal, penegakan hukum dan gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap *Fraud* di Sektor Pemerintahan.

ABSTRACT

This study aims to determine the empirical evidence of the effect of internal control systems, opportunities, individual morality, law enforcement and leadership styles on fraud in the government sector. This study applies quantitative approach in which the data are collected through questionnaires and analyzed by multiple linear regression utilizing SPSS software. The respondents in this study are the Civil Servants of OPD (Regional Apparatus Organization) of Seruyan Regency. The results of this study reveal that individual opportunity and morality affect fraud in the government sector, while the internal control system, law enforcement and leadership style do not affect fraud in the government sector.

Kata Kunci: *Fraud*, Gaya Kepemimpinan, Moralitas Individu, Peluang, Penegakan Hukum, Sistem Pengendalian Internal.

PENDAHULUAN

Instansi pemerintahan mempunyai peran penting dalam pembangunan negeri ini. Meskipun demikian, tingkat kecurangan (*Fraud*) kecurangan dari tahun ke tahun yang melibatkan pegawai di instansi pemerintahan terus melonjak naik. Tingginya *Fraud* di intansi pemerintahan disebabkan oleh sistem birokrasi yang berbelit-belit serta kurang transparan, lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian internal, penyalahgunaan jabatan, dan tekanan yang tinggi.

Kecurangan (*fraud*) secara umum merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain (Pramudita, 2013). Secara umum, bentuk kecurangan (*fraud*) yang sering terjadi di pemerintahan adalah praktik korupsi. Korupsi telah menjadi isu fenomenal dan menarik untuk dibahas dengan kasus-kasus yang kini berkembang dimasyarakat. Menurut UU 31/1999 Jo No. 20/2001, terdapat tujuh jenis korupsi, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan.

Menurut *Transparency International* Indonesia mengenai *Corruption Perception Inde*x pada tahun 2019 mengungkapkan bahwa terjadi suatu penurunan/kemerosotan mengenai upaya pemberantasan korupsi oleh sebagian besar negara dan Indonesia berada di posisi 85 dari 185 negara yang disurvei. Indonesia berada di posisi tersebut turut difasilitasi oleh tingginya korupsi yang terjadi di kalangan birokrasi, DPRD dan pemerintah. Dalam laporan tahunan yang diterbitkan KPK mengenai pemberantasan korupsi berdasarkan data dari tahun 2012 sampai 2015, menunjukkan bahwa terdapat 178 kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota yang melibatkan 16 orang Gubernur dan 51 orang Bupati/Walikota. Otonomi Daerah yang pada awalnya bertujuan untuk mendorong pembangunan daerah justru dijadikan untuk melakukan korupsi oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia (2018) terdapat beberapa pola korupsi yang dilakukan pemerintah daerah melalui putusan pengadilan dengan berkekuatan hukum tetap (*incracht*) serta dalam proses upaya hukum dengan beberapa sebagai berikut: Pola korupsi yang pertama berkaitan dengan perizinan di sektor pertambangan dan migas, kehutanan, tata ruang dan pertanahan. Pola korupsi yang kedua berkaitan dengan fungsi DPRD-Legislasi, anggaran serta pengawasan terhadap upaya pelaksanaan kebijakan. Pola korupsi yang ketiga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah. Pola korupsi yang keempat berkaitan dengan promosi, mutasi dan suap jabatan. Dan Pola terakhir berkaitan dengan dana desa yang merupakan pola mutakhir. Berdasarkan kelima pola tersebut, pola korupsi yang sering terjadi di daerah adalah upaya pelemahan pengawasan yang dijalankan oleh DPRD dengan cara memberi suap untuk memperoleh alokasi dana dari APBD dan manipulasi kebijakan melalui perubahan peraturan daerah.

Kabupaten Seruyan merupakan salah satu daerah di provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki kasus kecurangan melibatkan pemerintah daerah. Terdapat beberapa kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Seruyan antara lain kasus suap untuk memperlancar APBD tahun 2014 dimana 6 anggota DPRD Kabupaten Seruyan dan PLT Sekertaris Daerah sebagai tersangka (PROKAL.CO, 2015). Selain itu terdapat kasus korupsi proyek pengadaan pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung Kabupaten Seruyan yang melibatkan mantan bupati seruyan periode 2003-2013 dan Direktur PT Swa Karya Jaya yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 20,84 miliar (kpk.go.id, 2019).

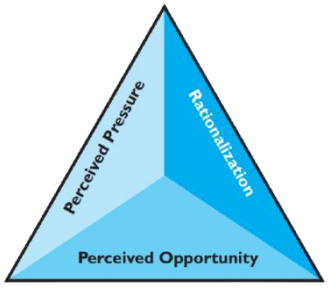
Penelitian ini mengacu pada penelitian Firdaus (2018)yang meneliti tentang Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Pegawai Melakukan Kecurangan (*Fraud*) pada Sektor Pemerintahan (Studi Kasus pada Pemerintahan di Kabupaten Klaten) yang menguji pengaruh asimetri informasi, penegakan hukum, kesesuaian kompensasi dan moralitas individu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, peneliti menggunakan variabel pengaruh sistem pengendalian internal, peluang kecurangan, moralitas individu, penegakan hukum, dan gaya kepemimpinan. Peneliti tidak menggunakan variabel asimetri informasi dan kesesuaian kompensasi karena peneliti ingin meneliti faktor lain yang mempengaruhi kecenderungan *fraud* di sektor pemerintahan

dengan menambahkan variabel sistem pengendalian internal, peluang dan gaya kepemimpin. Penelitian ini diharapkan dapat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya melalui obyek dan beberapa variabel yang berbeda.

TINJAUAN PUSTAKA

Fraud Triangle Theory

Teori ini dikemukakan oleh Donald R. Cressey pada tahun 1953. Berdasarkan teori yang dikemukan oleh Cressey terdapat 3 faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan (*fraud*), yaitu *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan), dan *rationalization* (rasionalisasi).



Gambar 2. 1
Sumber (Albrecht et al., 2012)

Pressure (Tekanan) merupakan motivasi seseorang untuk melakukan kecurangan disebabkan oleh kondisi ekonomi, gaya hidup konsumtif, serta tekanan internal yang berkaitan dengan lingkungan pribadi dan lingkungan organisasi yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan kecurangan (*fraud*). Cressey mengatakan bahwa seseorang yang melakukan kecurangan biasanya memiliki masalah keuangan yang menghimpit hidupnya sehingga membuat nyamerasa tertekan (Tuanakotta, 2018:207).

Opportunity (Peluang) adalah salah satu situasi atau kondisi yang menyebabkan terjadinya kecurang (*fraud*). Peluang bisa terjadi apabila terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian organisasi yang menyebabkan seseorang memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan kecurangan. Cressey berpendapat, ada dua komponen dari presepsi tentang peluang ini. Pertama, *general information*, yang merupakan pengetahuan bahwa kedudukan yang mengandung *trust* atau kepercayaan, dapat dilanggar tanpa konsekuensi. Pengetahuan ini diperoleh dari apa yang ia dengar atau lihat, misalnya dari pengalaman orang lain yang melakukan *fraud* dan tidak ketahuan atau tidak dihukum atau kena sanksi. Kedua *technical skill* atau keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan kejahatan tersebut. Misalnya, orang yang dipercaya untuk mengisi cek yang akan ditandatangani atasannya, membuat *fraud* yang berkaitan dengan pengisian cek (Tuanakotta, 2018:211).

Rationalization (rasionalisasi) merupakan keadaan dimana individu atau kelompok yang melakukan *fraud* sering kali mencari pembenaran atas tindakannya yang berhubungan dengan kecurangan (Tuanakotta, 2018:212). Pada umumnya, seseorang yang melakukan kecurangan, merasa tindakannya bukan termasuk kecurangan, tetapi hal itu merupakan haknya atau biasanya orang tersebut melakukan *fraud* karena mengikuti orang-orang sekitar yang melakukan hal itu. Contohnya berbohong dianggap bukan *fraud* karena banyak orang berbohong tidak diberi hukuman apapun.

Fraud (Kecurangan)

Standar-standar audit mendefinisikan kecurangan (*fraud*) merupakan tindakan yang sengaja dilakukan oleh satu atau lebih individu dalam suatu entitas yang melakukan penipuan untuk mendapat keuntungan ilegal (Hayes, Wallage, & Gortemaker, 2017:230). *Association of Certified Fraud Examiners* (*ACFE*) menggambarkan *fraud* dalam bentuk *fraud tree* yang mempunyai tiga cabang utama yaitu *corruption*, *asset misappropriation* dan *fraudulent statement.*

Corruption (Korupsi) menurut *ACFE* sedikit berbeda dengan istilah korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. *ACFE* membagi korupsi menjadi empat bentuk yaitu:

Conflicts of Interest (Konflik Kepentingan) merupakan benturan kepentingan yang terjadi ketika seorang pegawai bertindak atas nama kepentingan pihak ketiga selama melakukan pekerjaannya atau atas nama kepentingan diri sendiri dalam pengambilan keputusan tertentu yang mengakibatkan kerugian bagi instansi organisasi. *Bribery* (Penyuapan) adalah tindakan pemberian suatu imbalan atau hadiah kepada pihak terntentu untuk mendapatkan suatu keuntungan secara ilegal. *Illegal Gratuities* (Persenan ilegal) merupakan bentuk terselubung dari penyuapan. Persenan ilegal juga pemberian hadiah, penerimaan,

penawaran, atau permohonan sesuatu yang berharga misalnya kenaikan pangkat atau jabatan. *Economic Extortion* (Pemerasan ekonomi) merupakan tindakan berupa ancaman kepada seorang invidu atau organisasi untuk mendapatkan suatu yang berharga seperti uang, informasi atau kerjasama perusahaan.

Fraud Tree yang dibuat oleh ACFE sangat berguna dalam pemetaan *fraud* yang terjadi di lingkungan kerja. Pelaku *fraud* di Indonesia tentunya sering kali lebih kreatif dalam melakukan aksinya. Berdasarkan klasifikasi *fraud* dalam *fraud tree*, faktor penyebab *corruption, misappropriation of asset* dan *fraudulent financial statement* ialah lemah atau tidaknya pengendalian internal.

Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan *The Committee of Sponsoring Organization* (*COSO*) pengendalian internal merupakan suatu proses yang dirancang dan dilaksanakan dewan, manajemen serta pegawai yang berfungsi untuk memberikan *assurance* yang memadai (*reasonable assurance*) dalam mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien, reabilitas dari pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi yang berlaku (Hayes et al., 2017:260). Pengendalian internal menurut COSO terdiri atas lima komponen yang saling terkait, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian (*Control environment*)
   Lingkungan pengendalian merupakan tindakan, kebijakan dan prosedur yang merefleksikan keseluruhan top manajemen, direktur, dan pemilik entitas tentang pentingnya pengendalian dalam suatu entitas.
2. Penilaian risiko (*Risk assessment*
   Penilaian risiko dalam sistem pengendalian internal merupakan usaha manajemen dalam mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang relevan terhadap penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
3. Aktivitas pengendalian (*Control activities*)
   Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang diciptakan oleh manajemen untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan. Aktivitas pengendalian dapat digolongkan dalam pemisahan tugas yang memadai, otorisasi yang tepat atas transaksi dan aktivitas, pendokumentasian dan pencatatan yang cukup, pengawasan aset antara catatan dan fisik, serta pemeriksaan independen atas kinerja
4. Informasi dan komunikasi (*Information and communication*)
   Informasi dan komunikasi dalam pengendalian internal adalah metode yang dipergunakan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengklasifikasi, mencatat dan melaporkan semua transaksi entitas, serta untuk mempertahankan akuntabilitas yang berhubungan dengan aset.
5. Pemantauan
   Pemantauan dalam pengendalian internal adalah penilaian yang dilakukan manajemen secara berkala terkait efektifitas rancangan dan operasi dari struktur pengendalian internal untuk menentukan apakah aktivitas operasi berjalan seperti apa yang diharapkan dan dimodifikasi jika diperlukan.

Moralitas Individu

Menurut Bertens, moralitas (dari kata sifat latin moralis) mempunyai arti yang pada dasarnya sama dengan “moral”. Kita berbicara tentang “moralitas suatu perbuatan”, artinya segi moral suatu perbuatan baik atau buruk. Moralitas adalah sifat moral/keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk (Eliza, 2015).

Berdasarkan penelitian Liyanarachchi & Newdick (2009) penalaran moral individu berpengaruh terhadap perilaku etis mereka. Individu dengan moral tinggi cenderung melakukan *whistle blwoing* serta memiliki perilaku etis. Dengan demikian, ketika seseorang memiliki moral individu yang baik berada di situasi praktik yang menyimpang, mereka akan menghindar bahkan melaporkan kepada pihak yang berwenang. Sebaliknya, Ketika moral individu rendah maka seseorang berpotensi untuk memiliki dan terdorong untuk melakukan perilaku yang tidak etis.

Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan norma hukum dan peraturan dalam suatu negara sehingga tercipta keadilan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kecurangan umumnya tindakan ilegal yang dilakukan oleh orang-orang secara internal dan/atau eksternal organisasi untuk mendapatkan kepentingan pribadi dan/atau kelompok yang secara langsung merugikan pihak lain. Sistem hukum

atau penegakan hukum dapat menjadi *fraud* ketika adanya suatu tindakan atau kelalaian yang diperhitungkan akan mengakibatkan hilangnya sifat imprisal institusi (Pramudita, 2013).

Gaya Kepemimpinan

Menurut (Inaray et al., 2016) kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain melalui komunikasi yang baik dengan tujuan untuk membuat orang agar dengan penuh pengertian dan senang hati bersedia mengikuti kehendak pimpinan itu. Menurut Robbins & Judge terdapat empat jenis gaya kepemimpinan kepemimpinan yaitu gaya kepemimpinan kharismatik, gaya kepemimpinan transaksional, gaya kepemimpinan transformasional, gaya kepemimpinan visioner. "Pertama, gaya kepemimpinan kharismatik mempengaruhi pegawai dengan memperlihatkan kemampuan heroik atau tidak biasa saat sedang memimpin. Kedua, gaya kepemimpinan transaksional memotivasi pegawai untuk menuju pada tujuan yang telah ditetapkan dengan memperjelas pemisahan tugas. Ketiga, gaya kepemimpinan transformasional menginsipirasi para pegawai untuk mencapai kepentingan pribadi pegawai dan membawa dampak yang luar biasa bagi para pegawai. Keempat, gaya kepemimpinan visioner diartikan sebagai gaya kepemimpinan yang mampu menciptakan dan mendeskripsikan visi yang realistis, menarik dan kredibel tentang masa depan suatu organisasi yang sedang berkembang."(Wijayanto, 2020)

Gaya kepemimpinan ini mengacu pada gaya kepemimpinan transaksional yang memotivasi pegawai untuk menuju pada tujuan organiasasi dengan memperjelas pemisahan tugasnya. Menurut Zulkarnain (2013) gaya kepemimpinan yang buruk akan mempengaruhi kepuasan kerja karyawan, sehingga menyebabkan karyawan cenderung merugikan perusahaannya. Keberhasilan penerapan gaya kepemimpinan di instansi pemerintah dikarenakan oleh hubungan yang baik antara atasan dengan bawahan, dimana pemimpin telah menyampaikan pembagian tugas dengan baik sehingga proses komunikasi yang baik dalam suatu instansi mengakibatkan proses penyampaian informasi baik dari atasan kepada bawahan.

Penelitian Terdahulu

Penelitian Pramudita (2013) yang berjudul analisis *fraud* di sektor pemerintahan Kota Salatiga. Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara keefektifan sistem pengendalian internal dan gaya kepemimpinan terhadap *fraud* di sektor pemerintahan, dan tidak terdapat pengaruh antara penegakan hukum terhadap *fraud* di sektor pemerintahan.

Susandra & Hartina (2017) melakukan penelitian yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan *fraud* pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bogor. Hasil penelitian ini bahwa *opportunity* (peluang) berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud* di Dinas Kota Bogor.

Zulkarnain (2013) dalam penelitian yang berjudul analisis faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud* pada dinas Kota Surakarta. Hasil dari penelitian ini terdapat pengaruh negatif gaya kepemimpinan dan sistem pengendalian internal terhadap *fraud*. Selain itu, Tidak terdapat pengaruh penegakan hukum terhadap *fraud* disektor pemerintahan.

Damayanti (2016) dalam penelitian yang berjudul pengaruh pengendalian internal dan moralitas individu terhadap kecurangan akuntansi (Studi eksperimen pada pegawai bagian keuangan dan akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel independen pengendalian internal memiliki efek terhadap kecenderungan seseorang untuk melakukan kecurangan akuntansi. Selain itu, kecenderungan seseorang melakukan kecurangan akuntansi akan lebih tinggi dilakukan oleh orang dengan level moralitas individu rendah dibandingkan dengan yang memiliki level moralitas individu tinggi.

Prawira (2014) meneliti pengaruh moralitas individu, asimetri informasi dan efektivitas pengendalian internal terhadap kecurangan (*fraud*) akuntansi (Studi empiris pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Buleleng). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa moralitas individu berpengaruh terhadap *fraud,* ini juga mengindikasikan bahwa individu yang memiliki level penalaran moral rendah cenderung melakukan kecurangan akuntansi untuk keuntungann pribadi. Kebalikannnya, orang dengan level penalaran moral yang tinggi cenderung tidak melakukan kecurangan

akuntansi baik dalam kondisi terdapat elemen pengendalian internal maupun dalam kondisi tidak terdapat elemen pengendalian internal di organisasi.

Hipotesis Penelitian

Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mencegah *fraud* di sektor pemerintahan. Sistem pengendalian internal yang efektif dalam intansi pemerintahan tentunya memberikan pagar untuk membatasi, menghalangi, atau menutup akses para pelaku kecurangan. Salah satu bentuk kecurangan yang sering terjadi di pemerintahan di Indonesia adalah korupsi. Berdasarkan kondisi ini, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H_1: Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan

Peluang

Berdasarkan penelitian Susandra & Hartina (2017) peluang berpengaruh terhadap terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan. Semakin tinggi tingkat peluang dalam suatu instansi dapat menjadi sebuah motivasi untuk melakukan kecurangan. Hal ini disebabkan karena peluang yang ada timbul dari monopoli kekuasaan serta wewenang pejabat yang absolut tanpa adanya mekanisme pertanggung jawaban, hubungan personal antara pemimpin dan bawahannya. Berdasarkan kondisi ini, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H_2: Peluang berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan

Moralitas Individu

Moralitas individu secara tidak langsung juga berhubungan erat dengan kecenderungan *fraud* yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam suatu pemerintahan. Masyarakat akan menilai bahwa seorang individu bermoral jika tindakan dan perilakunya mencerminkan moralitas individu itu sendiri, yaitu dalam segala tindakannya dapat membedakan hal yang baik dan buruk.

Moralitas Individu tiap orang yang bekerja di dalam suatu pemerintahan harus dapat menentukan perbuatan mana yang baik atau buruk untuk masyarakat, pemerintah dan dirinya sendiri. Kecenderungan seseorang melakukan kecurangan akan lebih tinggi dilakukan oleh orang dengan level moralitas individu rendah dibandingkan dengan yang memiliki level moralitas individu tinggi Damayanti, (2016). Berdasarkan kondisi ini, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H_3: Moralitas Individu berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan

Penegakan Hukum

Kecurangan merupakan tindakan yang melawan hukum yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Dalam instansi pemerintah apabila penegakan hukum yang berlaku lema maka akan membuka ruang untuk para pelaku kecurangan. Kebanyakan dari pelaku kecurangan mengerti tentang hukum tetapi tetap melakukan tindakan yang melawan hukum. Oleh sebab itu, penegakan hukum yang berjalan sesuai dengan prosedur akan menekan terjadi kecurangan di sektor pemerintahan. Berdasarkan kondisi ini, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H_4: Penegakan hukum berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan

Gaya Kepemimpinan

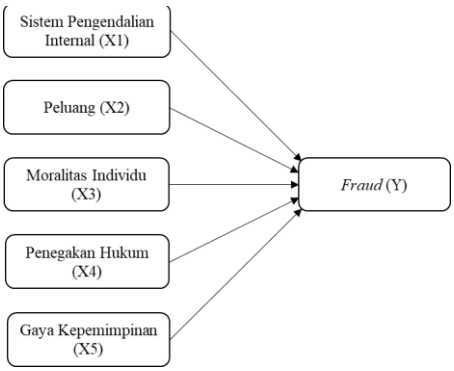
Lingkungan pemerintahan dalam menjalankan kebijakan tentunya tidak luput dari arahan seorang pemimpin. Pegawai cenderung menjadikan seorang pemimpin sebagai figur contoh dalam menjalankan tugasnya. Gaya kepemimpinan sangat memiliki peran dalam membangun budaya organisasi yang baik serta lingkungan kerja yang etis. Membangun lingkungan kerja yang etis diperlukan gaya kepemimpinan yang baik, sehingga diharapkan dapat menekan kecenderungan terjadi kecurangan. Berdasarkan kondisi ini, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H_5: Gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan

Kerangka Konseptual

Berdasarkan tinjauan pustaka dan hipotesa yang telah diterangkan di atas, maka kerangka konseptual dapat digambarkan bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal, peluang, moralitas individu, penegakan hukum, dan gaya kepemimpinan terhadap *fraud* sebagai berikut:

Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual



METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif karena peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian dan membuktikan secara empiris pengaruh variabel sistem pengendalian internal, peluang, moralitas individu, penegakan hukum dan gaya kepemimpinan terhadap *fraud* di sektor pemerintahan. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di OPD di Kabupaten Seruyan yang berjumlah 3.107. Jumlah pegawai negeri sipil berdasarkan data profil kepegawaian Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2019. Penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling* yang merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2019:133). Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
2. Masa kerja minimal 2 tahun
3. Jabatan sebagai kasubbag, kasi, bendahara pengeluaran dan staf keuangan

Kriteria sampel ini akan disertakan dalam kuesioner yang akan dibagian kepada PNS yang bekerja di OPD Kabupaten Seruyan. Besarnya sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2} = \frac{3.107}{1+3.107\ (0,1)^2} = \frac{3.107}{32,07} = 97$$

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = standar error (10%)

Berdasarkan rumus slovin di atas, diperoleh jumlah sampel sebesar 97 orang responden. Kuesioner yang akan disebarkan nantinya diperbanyak dari jumlah sampel yakni berjumlah 140 kuesioner dengan memperhitungkan terjadinya *error* seperti tidak terisinya kuesioner secara lengkap atau kuesioner yang tidak dikembalikan.

Tabel 3. 1 Rencana OPD yang akan dijadikan sampel

NO	Nama OPD
1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Dinas Perhubungan
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Dinas Pendidikan
6	Dinas Sosial
7	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
8	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
9	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
10	Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12	Inspektorat
13	Kecamatan Seruyan Hilir
14	Kecamatan Seruyan Hilir Timur

Definisi Operasional

Fraud

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *fraud* di sektor pemerintahan. *Fraud* di sektor pemerintahan adalah tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pegawai pemerintahan untuk mendapat keuntungan pribadi atau kelompok. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel *Fraud* mengacu pada pertanyaan dalam penelitian (Firdaus, 2018). Varibel ini diukur dengan menggunakan sekala likert yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan presepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam menyawab pertanyaan dari kuesioner dalam penelitian ini skala likert yang diberikan berkisar dari 1 sampai 5. Jawaban yang didapat diberi skor nilai (5) sangat setuju, (4) setuju (3) netral (2) tidak setuju (1) sangat tidak setuju. Variabel ini menggunakan indikator sebagai berikut:

a. Kecenderungan untuk memanipulasi, memalsukan atau melakukan perubahan catatan akuntansi

b. Kecenderungan untuk melakukan salah saji transaksi atau informasi yang signifikan dari laporan keuangan
c. Kecenderungan untuk sengaja melakukan kesalahan dalam penerapan prinsip akuntansi.
d. Kecenderungan untuk melakukan kesalahan penyajian laporan keuangan akibat pencurian aset yang membuat barang/jasa tidak diterima
e. Kecenderungan untuk menyajikan laporan keuangan yang salah karena tindakan yang tidak seharusnya terhadap aset disertai dokumen palsu.

Variabel Independen dalam penelitian ini terdiri dari sistem pengendalian internal, peluang, motivasi individu, penegakan hukum dan gaya kepemimpinan. Varibel ini diukur dengan menggunakan sekala likert. Dalam menyawab pertanyaan dari kuesioner dalam penelitian ini skala likert yang diberikan berkisar dari 1 sampai 5. Jawaban yang didapat diberi skor nilai (5) sangat setuju, (4) setuju (3) netral (2) tidak setuju (1) sangat tidak setuju.

Sistem pengendalian internal (X_1)

Sistem pengendalian internal adalah Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan salah satu instrument penting dalam upaya mencegah *fraud* di sektor pemerintahan. Sistem pengendalian internal yang efektif dalam intansi pemerintahan tentunya memberikan pagar untuk membatasi, menghalangi, atau menutup akses para pelaku kecurangan. Instrumen yang digunakan untuk mengukur sistem pengendalian internal terdiri dari lima pertanyaan yang mengacu pada Panggabean (2016) Indikator pengukuran variabel sistem pengendalian internal meliputi:

a. Lingkungan pengendalian
b. Penilaian risiko
c. Kegiatan pengendalian
d. Informasi dan komunikasi
e. pemantauan

Peluang (X_2)

Peluang adalah salah satu situasi atau kondisi yang menyebabkan terjadinya kecurang (*fraud*). Peluang bisa terjadi apabila terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian organisasi yang menyebabkan seseorang memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan kecurangan. Kewenangan yang dimiliki oleh aparat pemerintahan seringkali digunakan sebagai peluang untuk memanfaatkan keadaan agar mendapat keuntungan pribadi. Instrumen yang digunakan untuk megukur variabel peluang terdiri dari 6 pertanyaan mengacu pada pertanyaan yang digunakan Fuadi (2016) dengan indikator sebagai berikut:

a. Kurangnya pengendalian untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran
b. Ketidakmampuan untuk menilai kualitas dari suatu hasil.
c. Kegagalan dalam mendisiplinkan pelaku kecurangan
d. Kurangnya akses informasi.
e. Ketidaktahuan, apatis, atau ketidakpedulian, dan kemampuan yang tidak memadai dari pihak yang dirugikan
f. Kurangnya pemeriksaan

Moralitas individu (X_3)

Berdasarkan penelitian Liyanarachchi dan Newdick (2009) penalaran moral individu berpengaruh terhadap perilaku etis mereka. Individu dengan moral tinggi cenderung melakukan *whistle blwoing* serta memiliki perilaku etis. Dengan demikian, ketika seseorang memiliki moral individu yang baik berada di situasi praktik yang menyimpang, mereka akan menghindar bahkan melaporkan kepada pihak yang berwenang. Pengukuran variabel moralitas individu menggunakan instrumen pertanyaan melalui kasus dilema etika akuntansi yang mengacu pada penelitian Firdaus (2018) dengan indikator sebagai berikut:

a. Moralitas pimpinan dalam menyelesaikan LRA untuk kepentingan sendiri
b. Moralitas pimpinan menyuap staf akuntansi
c. Moralitas pimpinan dalam memerintah menyelesaikan LRA yang tidak sesuai kenyataan
d. Moralitas pimpinan dalam menyusun LRA seperti periode sebelumnya
e. Moralitas pimpinan dalam menyusun LRA sesuai aturan karena takut sanksi UU

Penegakan hukum (X_4)

Dalam instansi pemerintah apabila penegakan hukum yang berlaku lemah maka akan membuka ruang untuk para pelaku kecurangan. Kebanyakan dari pelaku kecurangan mengerti tentang hukum tetapi tetap melakukan tindakan yang melawan hukum. Oleh sebab itu, penegakan hukum

yang berjalan sesuai dengan prosedur akan menekan terjadi kecurangan di sektor pemerintahan. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel penegakan hukum terdiri dari 5 pertanyaan yang dikembangkan oleh Pramudita (2013). Variabel diukur dengan indikator sebagai berikut:

a. Daya tanggap pejabat penerimaan lambat
b. Proses penepengakan hukum pidana selesai
c. Putusan pengadilan sesuai dengan fakta-fakta hukum
d. Aturan hukum dalam instansi
e. Ketaatan terhadap hukum

Gaya kepemimpinan (X_5)

Gaya kepemimpinan sangat memiliki peran dalam membangun budaya organisasi yang baik serta lingkungan kerja yang etis. Oleh karena itu, untuk membangun lingkungan kerja yang etis diperlukan gaya kepemimpinan yang baik, sehingga diharapkan dapat menekan kecenderungan terjadi kecurangan. Intrumen pengukuran variabel gaya kepemimpinan menggunakan pertanyaan yang dikembangkan oleh Pramudita (2013). Variabel Diukur dengan indikator sebagai berikut:

a. Pimpinan menghargai bawahan
b. Pimpinan menentukan tujuan yang realistis
c. Pimpinan memberikan arah dan tujuan yang diinginkan
d. Pimpinan memberikan inspirasi
e. Pimpinan memberi penghargaan

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang bersumber dari kuesioner yang dibagikan pada PNS yang bekerja di OPD Kabupaten Seruyan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dan disertakan dalam kuesioner sebanyak 140. Kuesioner dibagikan diperbanyak dari jumlah sampel yang diperlukan dengan memperhitungkan terjadinya *error* pada kuesioner seperti tidak terisi secara lengkap atau tidak kembali.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner. Kuesioner tersebut disebarkan secara langsung kepada responden yaitu kasubbag, kasi, bendahara pengeluaran dan staf keuangan yang bekerja sebagai PNS pada OPD Kabupaten Seruyan untuk kemudian di isi sesuai dengan presepsi responden.

Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan alat analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan Analisis Regresi dengan menggunakan software statistik SPSS. Persamaan Analisis berganda dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y= \alpha+\beta1X1 + \beta2X2 + \beta3X3 + \beta4X4 + \beta5X5 + e$$

Dimana:

Y = Kecurangan (*fraud*)

α = Konstanta

β1-5 = Koefisien Regresi

X1 = Sistem Pengendalian Internal

X2 = Peluang

X3 = Moralitas Individu

X4 = Penegakan Hukum

X5 = Gaya Kepemimpinan

e = Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan obyek PNS yang bekerja pada OPD Kabupaten Seruyan yang memegang jabatan sebagai kassubag, kasi, bendahara pengeluaran dan staff bagian keuangan dengan ukuran sampel berdasarkan rumus Slovin sebanyak 97 orang. Penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner yang disebarkan kepada 14 OPD di Kabupaten Seruyan sejumlah 140 kuesioner. Masing-masing kuesioner yang telah disebarkan secara langsung kepada OPD kabupaten seruyan telah dilengkapi dengan kriteria sampel. Kuesioner dibagikan diperbanyak dari jumlah sampel dengan pertimbangan terjadinya *error* pada kuesioner seperti tidak terisi secara lengkap atau tidak kembali.

Berdasarkan tabel 4.1. kuesioner yang telah dibagikan dengan jumlah 140 kepada responden. Jumlah Kuesioner yang kembali sebanyak 111 dan terdapat 103 kuesioner yang bisa diolah datanya untuk penelitian ini. Jumlah kuesioner sudah sangat mencukupi karena data yang diperlukan untuk diolah sesuai dengan ukuran sampel yang diperlukan

yaitu sebanyak 97. Kuesioner ini kemudian diolah datanya dengan menggunakan SPSS.

Tabel 4. 1 OPD yang dijadikan sampel

NO	Nama OPD	Kuesioner yang diberikan	Kuesioner yang dikembalikan	Kuesioner yang dapat diolah
1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	10	10	8
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10	10	10
3	Dinas Perhubungan	10	10	10
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10	8	8
5	Dinas Pendidikan	10	5	3
6	Dinas Sosial	10	10	10
7	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	10	2	1
8	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	10	10	10
9	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	10	7	7

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menguji kelayakan kuesioner apakah setiap item pertanyaan valid atau tidak. Item layak digunakan apabila nilai koefisien korelasi ≥ 0,3. Sedangkan nilai koefisien korelasi di bawah 0,3 maka dianggap tidak layak digunakan (Priyastama, 2017:168). Berikut hasil uji validitas penelitian ini pada tabel 4.6.

Tabel 4. 2 Uji Validitas

Variabel	Pertanyaan	*Corrected Item- Total Correlation*	Keterangan
Fraud	P1	0,616	Valid
	P2	0,658	Valid
	P3	0,528	Valid
	P4	0,560	Valid
	P5	0,510	Valid
	P6	0,494	Valid
	P7	0,636	Valid
	P8	0,703	Valid
	P9	0,467	Valid
Sistem Pengendalian Internal	P1	0,565	Valid
	P2	0,734	Valid
	P3	0,681	Valid
	P4	0,646	Valid
	P5	0,647	Valid
	P6	0,322	Valid
Peluang	P1	0,669	Valid
	P2	0,609	Valid
	P3	0,554	Valid
	P4	0,482	Valid
	P5	0,559	Valid
	P6	0,559	Valid
Moralitas Individu	P1	0,707	Valid
	P2	0,697	Valid
	P3	0,830	Valid
	P4	0,821	Valid
	P5	0,460	Valid
	P6	0,421	Valid
Penegakan Hukum	P1	0,462	Valid
	P2	0,663	Valid
	P3	0,672	Valid
	P4	0,572	Valid
	P5	0,667	Valid
Gaya Kepemimpinan	P1	0,698	Valid
	P2	0,612	Valid
	P3	0,619	Valid
	P4	0,526	Valid
	P5	0,403	Valid

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Berdasarkan output data tabel 4.6 di atas, semua pertanyaan memiliki nilai koefisien korelasi di atas 0,3 sehingga dapat disimpulkan semua item pertanyaan pada masing-masing variabel valid.

Uji Reliabilitas

Uji reablilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur dalam penelitian. Uji reliabilitas dilakukan dengan teknik *cronbach alpha* yang dilihat dari hasil *output reliability statistics.* Berikut hasil uji reliabilitas yang dapat dilihat pada tabel 4.7.

Tabel 4. 3 Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Fraud	0,844	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal	0,777	Reliabel
Peluang	0,801	Reliabel
Moralitas Individu	0,862	Reliabel
Penegakan Hukum	0,813	Reliabel
Gaya Kepemimpinan	0,786	Reliabel

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Berdasarkan *output* data tabel 4.7 di atas, semua variabel memiliki nilai *Cronbach Alpha* ≥ 0,6 yang artinya data dapat dikatakan reliabel, sehingga layak digunakan sebagai alat ukur instrumen kuesioner dalam penelitian ini.

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji nilai residual yang dihasilkan dengan regresi distribusi normal atau non normal. Model regresi yang baik tidak memiliki nilai residual yang berdistribusi normal.

Tabel 4. 4 Uji One Sample Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		97
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	4,38442588
Most Extreme Differences	Absolute	,059
	Positive	,049
	Negative	-,059
Test Statistic		,059
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200[c,d]
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Model regresi dikatakan berdistribusi normal jika nilai sig residual lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2018:167). Berdasarkan tabel 4.6. model regresi ini dikatakan normal karena nilai sig lebih dari 0,05 yaitu 0,200 sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini layak digunakan.

Uji Multikolinearitas

Model regresi dapat dikatakan tidak memiliki multikolinearitas jika nilai *Tolerance* dan *Inflation Factor* (VIF). Nilai VIF harus lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas pada model regresi (Priyastama, 2017:122).

Tabel 4. 5 Uji Multikolinearitas

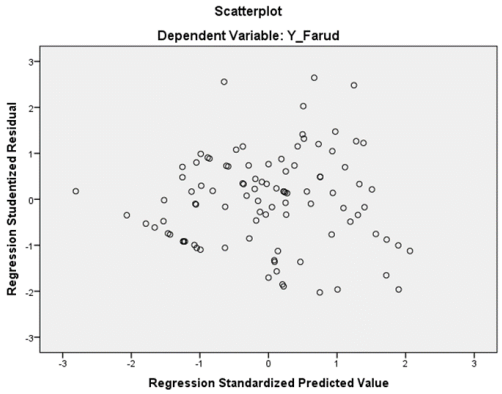
Model	Tolerance	VIF
(Constant)		
Sistem Pengendalian Internal	0,870	1,150
Peluang	0,810	1,235
Moralitas Individu	0,934	1,070
Penegakan Hukum	0,633	1,579
Gaya Kepemimpinan	0,760	1,316

Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.9 model regresi ini tidak mengalami gejala multikolinearitas karena nilai *Tolerance* dan *VIF* dari ketiga variabel memenuhi.

Uji Heterokedastisitas

Model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas, jika tidak tidak ada pola yang jelas pada gambar *scatterplots*, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y (Ghozali, 2018:137–138).

Gambar 4. 1 Grafik Scatterplot



Sumber: Data yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan melihat grafik *scatterplot* pada gambar 4.1. Model regresi ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas sehingga disimpulkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi faktor terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan.

Hasil Uji Hipotesa

Uji Koefisien Determinasi R^2 (R *Square*)

Tabel 4. 6 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary[b]				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,561[a]	,314	,277	4,503
a. Predictors: (Constant), X5_Kepemimpinan, X3_Moralitas, X2_Peluang, X1_SPI, X4_Hukum				
b. Dependent Variable: Y_Farud				

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Berdasarkan hasil olah data pada tabel 4.10 disimpulkan bahwa sebesar 31,4% variabel dependen *fraud* dipengaruhi oleh variabel independen yaitu sistem pengendalian internal, peluang moralitas individu, penegakan hukum, dan gaya kepemimpinan dan sisanya sebesar 68,6% dipengaruhi variabel lain diluar variabel dalam penelitian ini.

Uji t

Dasar pengambilan keputusan uji t berdasarkan nilai signifikansi yaitu jika nilai sig. < 0,05, maka variabel X secara parsial berpengaruh terhadap variabel Y (Ghozali, 2018:99). Hipotesis dapat diterima atau ditolak jika:

1. Jika t Hitung > t Tabel dan Sig < 0,05 maka Ha diterima dan menolak Ho
2. Jika t Hitung < t Tabel dan Sig > 0.05 maka Ha ditolak dan menerima Ho

Tabel 4. 7 Uji t

Coefficients[a]							
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Keterangan
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	4.244	5.511		1.311	.443	
	Sistem Pengendalian Internal	-.163	.162	-.094	-1.009	.316	Ditolak
	Peluang	.546	.130	.470	4.216	.000	Diterima
	Moralitas Individu	.505	.091	.496	5.527	.000	Diterima
	Penegakkan Hukum	.094	.203	.051	.466	.642	Ditolak
	Gaya Kepemimpinan	-.043	.198	-.022	-.219	.827	Ditolak

a. Dependent Variable: *Fraud*

Hasil persamaan regresi berdasarkan tabel di atas sebagai berikut:

Y= 4,244 -0,163 X1 + 0,546 X2 + 0,505 X3 + 0,094 X4 -0,043 X5

Keterangan:

Y = Kecurangan (*fraud*)

X1 = Sistem Pengendalian Internal

X2 = Peluang

X3 = Moralitas Individu

X4 = Penegakan Hukum

X5 = Gaya Kepemimpinan

Hasil uji t berdasarkan tabel 4.11 adalah sebagai berikut:

Nilai signifikansinya 0,316 lebih besar 0,05 dan nilai t hitung sebesar -1,009 lebih kecil dari t tabel sebesar 2,011. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan, sehingga hipotesis ditolak. Nilai signifikansinya 0,000 lebih kecil 0,05 dan nilai t hitung sebesar 4,216 lebih besar dari t tabel sebesar 2,011. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel peluang berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan, sehingga hipotesis diterima. Nilai signifikansinya 0,000 lebih kecil 0,05 dan nilai t hitung sebesar 5,527 lebih besar dari t tabel sebesar 2,011. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel moralitas individu berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan, sehingga hipotesis diterima. Individu dengan moral tinggi cenderung melakukan *whistle blwoing* serta memiliki perilaku etis. Dengan demikian, ketika seseorang memiliki moral individu yang baik berada di situasi praktik yang menyimpang, mereka akan menghindar bahkan melaporkan kepada pihak yang berwenang. Nilai signifikansinya 0,642 lebih besar 0,05 dan nilai t hitung sebesar 0,466 lebih kecil dari t tabel sebesar 2,011. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel penegakan hukum tidak berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan, sehingga hipotesis ditolak. Nilai signifikansinya 0,827 lebih besar 0,05 dan nilai t hitung sebesar -0,219 lebih kecil dari t tabel sebesar 2,011. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan, sehingga hipotesis ditolak.

Pembahasan

Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *fraud* di sektor pemerintahan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayem & Kusumasari (2020) bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan. Tidak berpengaruhnya sistem pengendalian internal terhadap *fraud* berarti bahwa pengendalian internal di lingkungan pemerintah Kabupaten Seruyan telah berjalan secara efektif sesuai dengan tujuannya sehingga mampu menekan terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan.

Penelitian ini juga sejalan dengan teori yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa sistem Pengendalian Internal yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen dinas pemerintahan dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional yang sehat dan aman. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian oleh Faisal (2013), Panggabean (2016) dan Cendani (2020) yang menunjukkan pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa individu tanpa pengendalian internal akan lebih mungkin untuk melakukan penipuan akuntansi Individu yang memiliki akses ke elemen pengendalian internal.

Peluang berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Susandra & Hartina (2017) bahwa peluang berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemertintahan. Penelitian ini juga sejalan dengan teori *fraud triangle* yang menjelaskan bahwa peluang dapat seseorang untuk melakukan kecurangan disebabkan oleh kondisi ekonomi, gaya hidup konsumtif, serta tekanan internal yang berkaitan dengan lingkungan pribadi dan lingkungan organisasi yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan kecurangan. Seseorang yang melakukan kecurangan biasanya memiliki masalah keuangan yang menghimpit hidupnya sehingga membuat nya merasa tertekan.

Cressey berpendapat, ada dua komponen dari presepsi tentang peluang ini. Pertama, *general information*, yang merupakan pengetahuan bahwa kedudukan yang mengandung *trust* atau kepercayaan, dapat dilanggar tanpa konsekuensi. Pengetahuan ini diperoleh dari apa yang ia dengar atau lihat, misalnya dari pengalaman orang lain yang melakukan *fraud* dan tidak ketahuan atau tidak dihukum atau kena sanksi. Kedua *technical skill* atau keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan kejahatan tersebut. Misalnya, orang yang dipercaya untuk mengisi cek yang akan ditandatangani atasannya, membuat *fraud* yang berkaitan dengan pengisian cek (Tuanakotta, 2018:211).

Moralitas individu berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prawira (2014) bahwa moralitas individu mempengaruhi kecenderungan terjadinya

fraud. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspasari & Suwardi (2012) yang menunjukkan menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada individu dengan level penalaran moral tinggi untuk tidak melakukan kecurangan akuntansi, baik dalam kondisi ada maupun tidak ada elemen pengendalian internal di organisasi. Berpengaruhnya moralitas individu terhadap *fraud* di sektor pemerintahan ini bisa disebabkan oleh tingkat moralitas individu pada setiap orang yang berbeda-beda, sehingga apabila tingkat moralitas individu baik dan jujur maka meskipun pengendalian internal lemah dan peluang kecurangan besar tidak akan mempengaruhinya melakukan kecurangan. Sebaliknya apabila moralitas individu seseorang kurang baik, maka dia akan selalu mencari cara dan celah untuk melakukan kecurangan.

Berdasarkan penelitian Liyanarachchi & Newdick (2009) penalaran moral individu berpengaruh terhadap perilaku etis mereka. Individu dengan moral tinggi cenderung melakukan whistle blwoing serta memiliki perilaku etis. Dengan demikian, ketika seseorang memiliki moral individu yang baik berada di situasi praktik yang menyimpang, mereka akan menghindar bahkan melaporkan kepada pihak yang berwenang. Sebaliknya, Ketika moral individu rendah maka seseorang berpotensi untuk memiliki dan terdorong untuk melakukan perilaku yang tidak etis.

Penelitian ini mendukung teori *fraud* triangle berkaitan dengan faktor rasionalisasi yang merupakan keadaan dimana individu atau kelompok yang melakukan *fraud* sering kali mencari pembenaran atas tindakannya yang berhubungan dengan kecurangan (Tuanakotta, 2018:212). Pada umumnya, seseorang yang melakukan kecurangan, merasa tindakannya bukan termasuk kecurangan, tetapi hal itu merupakan haknya atau biasanya orang tersebut melakukan *fraud* karena mengikuti orang-orang sekitar yang melakukan hal itu. Jadi, berpengaruhnya moralitas individu terhadap *fraud* di sektor pemerintahan dikarenakan penalaran moral dari individu yang berbeda.

Penegakan hukum tidak berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan, artinya setiap peningkatan *fraud* di sektor pemerintahan tidak dipengaruhi oleh tegak atau tidaknya hukum yang berlaku. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramudita (2013), Zulkarnain (2013) dan Firdaus (2018) menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan. Tidak berpengaruhnya penegakan hukum terhadap *fraud*. Pramudita (2013), Zulkarnain (2013) menyatakan bahwa keefektifan penegakan hukum belum tentu mampu menekan kecenderungan kecurangan apabila para pegawai yang bekerja di sektor pemerintahan.

Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitia Usman (2017) yang menghasilkan bahwa penegakan hukum berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan. Menurut Usman (2017) Penegakan hukum yang efektif dapat mengurangi *fraud* di sektor pemerintahan. Hasil penelitian ini menunjukan penegakan hukum tidak berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan. Hal ini mungkin berkaitan teori *fraud triangle* yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan kecurangan akan merasionalisasikan tindakannya sehingga berani melakukan kecurangan meskipun dengan mengabaikan sanksi dan resiko yang akan terjadi dikemudian hari.

Gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Panggabean (2016) dan Zulkarnain (2013) menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan. Tidak berpengaruhnya gaya kepemimpinan terhadap *fraud* ini berarti bahwa kepemimpinan di lingkungan organisasi pemerintahan kabupaten seruyan telah terbangun dengan baik sehingga mampu menekan kecenderungan *fraud* di sektor pemerintahan. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Setiawan et al., (2020) yang mengatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan.

Penelitian ini juga sejalan dengan teori yang telah dijabarkan sebelumnya terkait keberhasilan penerapan gaya kepemimpinan di instansi pemerintah dikarenakan oleh hubungan yang baik antara atasan dengan bawahan, dimana pemimpin telah menyampaikan pembagian tugas dengan baik hingga proses komunikasi yang baik dalam suatu instansi mengakibatkan proses penyampaian informasi baik dari atasan

kepada bawahan dan diharapkan dapat mengurangi kecenderungan terjadinya *fraud*.

Secara umum variabel peluang dan moralitas individu yang berpengaruh signifikan terhadap terjadinya *fraud*. Berdasarkan jawaban responden hal ini dapat dikarenakan kurangnya akses informasi, ketidaktahuan, apatis, atau ketidakpedulian, dan kemampuan yang tidak memadai dari pihak yang dirugikan dan kurangnya pemeriksaan.

Sedangkan sistem pengendalian internal, penegakan hukum dan gaya kepemimpinan tidak berpengaruh signifikan terhadap terjadinya *fraud*. Hal ini bermakna bahwa lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan telah dilaksanakan secara efektif. Sedangkan keefektifan penegakan hukum belum tentu mampu menekan kecenderungan kecurangan apabila para pegawai yang bekerja di sektor pemerintahan. Pada variabel gaya kepemimpinan menunjukkan bahwa pimpinan menghargai bawahan, pimpinan menentukan tujuan yang realistis, pimpinan memberikan arah dan tujuan yang diinginkan, pimpinan memberikan inspirasi dan pimpinan memberi penghargaan. Hal ini didukung dengan nilai rentang skala yang banyak di rentang tinggi pada variabel gaya kepemimpinan dibandingkan variabel yang lain.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat peluang terjadinya kecurangan di sektor pemerintahan Kabupaten Seruyan, hal ini dapat disebabkan pelaku kecurangan biasanya sudah mengenal lingkungan kerja dan mengetahui celah atau peluang kecurangan dengan presepsi bahwa resiko tertangkap kecil. Terjadinya *fraud* di Kabupaten Seruyan juga berkaitan dengan moralitas individu yang bisa disebabkan oleh tingkat moralitas individu pada setiap orang yang berbeda-beda, sehingga apabila tingkat moralitas individu baik dan jujur maka meskipun pengendalian internal lemah dan peluang kecurangan besar tidak akan mempengaruhinya melakukan kecurangan. Sebaliknya apabila moralitas individu seseorang kurang baik, maka dia akan selalu mencari cara dan celah untuk melakukan kecurangan. Oleh karena itu peningkatan sistem pengendalian internal, penegakan hukum serta gaya kepemimpinan sangat diperlukan untuk menekan terjadinya *fraud* di Kabupaten Seruyan.

Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa R^2 bernilai kecil yang dapat disebabkan oleh pengaruh variabel lain di luar variabel dalam penelitian ini seperti variabel komitmen organisasi dan sistem politik.

Saran

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Seruyan, hasil penelitian ini menunjukkan peluang dan moralitas individu berpengaruh terhadap terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan. Oleh karena itu, peneliti memberi saran Pemerintah Kabupten Seruyan sebaiknya lebih memperhatikan peluang-peluang terjadinya fraud, dikarenakan memiliki nilai rata-rata terendah dibandingkan yang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertegas tugas dan wewenang jabatan agar tidak tumpang tindih.
2. Bagi Peneliti selanjutnya yang meneliti *fraud* di sektor pemerintahan untuk menggunakan variabel independen berkaitan dengan *fraud* di luar variabel dalam penelitian ini seperti komitmen organisasi dan sistem politik serta memperluas sampel penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. F. (2012). *Fraud Examination* (Fourth). Cengage Learning.

Ayem, S., & Kusumasari, K. F. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, *10*(2), 160. https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.25827

BPKP. (2016). *Faktor-Faktor Penyebab Kepala Daerah Korupsi*. Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan. http://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/2674/16.050-Faktor-Faktor-Penyebab-Kepala-Daerah-Korupsi

Cendani, A. A. (2020). PENGARUH

MORALITAS INDIVIDU DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI PADA BAPPEDA KOTA MAKASSAR (Studi kasus SKPD kota Makassar). *Orphanet Journal of Rare Diseases*, *21*(1), 1–9.

Damayanti, S., & Nadya, D. (2016). Pengaruh Pengendalian Internal dan Moralitas Individu Terhadap Kecurangan Akuntansi. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, *5*. https://doi.org/10.21831/nominal.v5i2.11725

Eliza, Y. (2015). Pengaruh Moralitas Individu dan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada SKPD di Kota Padang). *E-Jurnal Akuntansi*, *4*(1), 86–100. https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i02.p12

Faisal, M. (2013). Analisis Fraud Di Sektor Pemerintahan Kabupaten Kudus. *Accounting Analysis Journal*, *2*(1). https://doi.org/10.15294/aaj.v2i1.1181

Firdaus, M. H. Z. (2018). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Pegawai Melakukan Kecurangan/ Fraud pada Sektor Pemerintahan (Studi Kasus pada Pemerintahan di Kabupaten Klaten)*.

Fuadi, M. (2016). Determinan kecurangan Akademik Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang Dengan Konsep Fraud Triangle. *Sosial, Ekonomi, Dan Humaniora*, 1–200.

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Multivariate dengan Program IBM SPSS 19* (5th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponergoro.

Hayes, R., Wallage, P., & Gortemaker, H. (2017). *Prinsip-Prinsip Pengauditan International Standards on Auditing*. Salemba Empat.

Inaray, J. C., Nelwan, O. S., & Lengkong, V. P. K. (2016). Pengaruh Kepemimpinan Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Amanah Finance Di Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, *16*(2), 459–470.

International, T. (2020). *Corruption Perceptions Index 2019*. Transparency International Indonesia. https://riset.ti.or.id/corruption-perceptions-index-2019/

Juwono, D. V. J., & Mayasari, D. I. (n.d.). *Pola Korupsi Pemerintah Daerah dan Pimpinan Transformasional*. Komisi Pemberantasan Korupsi. Retrieved November 24, 2020, from https://www.kpk.go.id/id/berita/publik-bicara/782-pola-korupsi-pemerintah-daerah-dan-pimpinan-transformasional

Liyanarachchi, G., & Newdick, C. (2009). The impact of moral reasoning and retaliation on whistle-blowing: New Zealand evidence. *Journal of Business Ethics*, *89*(1), 37–57. https://doi.org/10.1007/s10551-008-9983-x

No Title. (2019). Kpk.Go.Id. https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1294-kpk-tetapkan-bupati-seruyan-tersangka-kasus-tpk-proyek-pembangunan-pelabuhan

Panggabean, J. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Karo. *Repositori Institusi UNIVERSITAS SUMATERA UTARA*, 1–15. http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/550

Permatasari, D. E., Kurrohman, T., & Kartika. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kecenderungan Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintah. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, *14*(1), 37–44. journal.ibs.ac.id/index.php/jkp/article/download/71/70

Pramudita, A. (2013). Analisis Fraud Di Sektor Pemerintahan Kota Salatiga. *Accounting Analysis Journal*, *2*(1). https://doi.org/10.15294/aaj.v2i1.1156

Prawira, H. & D. (2014). Pengaruh Moralitas Individu, Asimetri Informasi dan Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi (Stusi Empiris pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Buleleng). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, *2*(1), 1–12.

Priyastama, R. (2017). *Buku Sakti Kuasai SPSS*. START UP.

PROKAL.CO. (2015). *Kasus Suap DPRD Rp 2,08 M, Sekda Seruyan Tersangka*. PRO Kalteng. https://www.kejaksaan.go.id/infoperkara.php?sec=sd&det=MTM2ODY=&idsu=15&bc=

Puspasari, N., & Suwardi, E. (2012). PENGARUH MORALITAS INDIVIDU DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI: STUDI EKSPERIMEN PADA KONTEKS PEMERINTAHAN DAERAH. In *Repositori Universitas Gajah Mada*.

Ramadhan, A. (2019). *KPK Tetapkan Eks Bupati Seruyan Tersangka Kasus Korupsi Pelabuhan*. KOMPAS.Com. https://nasional.kompas.com/read/2019/10/14/19521291/kpk-tetapkan-eks-bupati-seruyan-tersangka-kasus-korupsi-pelabuhan

Setiawan, W., Alfianto, N., & Kusumo, W. K. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Fraud Di Sektor Pemerintaha Pada Dinas Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, *21*(1), 68. https://doi.org/10.26623/jdsb.v21i1.1505

Sugiyono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. ALFABETA.

Susandra, F., & Hartina, S. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Fraud Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Di Kota Bogor. *Jurnal Akunida*, *3*(2), 35. https://doi.org/10.30997/jakd.v3i2.987

Tuanakotta, T. M. (2018). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif* (2nd ed.). Salemba Empat.

Usman, S. (2017). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA FRAUD DI SEKTOR PEMERINTAHAN (Studi Pada SKPD Kabupaten Luwu Timur). *Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, *4*, 9–15. https://lib.unnes.ac.id/18049/

Wijayanto, F. L. (2020). Komitmen Organisasi, Kapabilitas, Gaya Kepemimpinan dan Kecenderungan Fraud di Sektor Pemerintahan (Persepsi Aparatur Sipil Negara di Kota Salatiga). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *9*(1), 120. https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v9i1.24422

Zulkarnain, R. M. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud di Sektor Pemerintahan (Studi Kasus Pada Dinas Se-Kota Surakarta). In *Accounting Analysis Journal*.